

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Siapkan Banding untuk Sistem Jalan Berbayar

Diduga, terdapat pelanggaran dalam lelang *electronic road pricing* terdahulu.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA – Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersiap mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta perihal *electronic road pricing*. Dinas Perhubungan akan segera berkoordinasi dengan jaksa pengacara negara untuk menyiapkan memori banding. “Kami akan mengajukan banding terhadap putusan itu untuk melaksanakan asas pemerintahan yang baik,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, kemarin.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan yang diajukan oleh PT Bali Towerindo Sentra pada Selasa lalu. Bali Towerindo menggugat surat pengumuman pembatalan lelang yang diterbitkan oleh Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik – instansi di bawah Dinas Perhubungan.

Hakim Pengadilan kemudian menganulir surat pembatalan lelang yang terbit pada 2 Agustus 2019 tersebut. Pengadilan juga memerintahkan Dinas mencabut surat pembatalan lelang bernomor 33620127 itu.

Menurut Syafrin, langkah Dinas membatalkan lelang ERP pada tahun lalu sudah tepat. Apalagi, kebijakan itu juga telah sesuai dengan saran dari Kejaksaan Agung. Pembatalan lelang saat itu juga ditujukan untuk mencegah potensi kerugian negara.

Syafrin mengungkapkan, dalam lelang ERP yang terdahulu, terdapat pelanggaran berupa *post bidding* – tindakan mengubah, menambah, dan mengu-

rangi dokumen pengadaan atau penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran. Jika lelang sistem jalan berbayar elektronik saat itu diteruskan, ada potensi pelanggaran pidana.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Nirwan Nawawi, belum memberi penjelasan mengenai pengajuan banding yang ditempuh oleh Dinas Perhubungan DKI. Pertanyaan *Tempo* tak kunjung dibalas hingga tulisan dibuat. Jaksa pengacara negara dari Kejaksaan Tinggi merupakan kuasa hukum dari Dinas terkait dengan gugatan ERP itu.

Kuasa hukum PT Bali Towerindo Sentra, Gabriel Mukuan, belum bisa memberikan penjelasan mengenai keputusan Dinas untuk mengajukan banding. “Saya harus koordinasi dulu dengan *principal*,” ujar dia.

Ketua Komisi Bidang Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, Abdul Aziz, mendukung rencana Dinas Perhubungan untuk melakukan lelang ulang ERP. Menurut dia, alasan Dinas melakukan lelang ulang itu sudah tepat karena lelang terdahulu ditengarai bermasalah.

Sebelumnya, Dinas menyatakan akan tetap melakukan lelang ulang ERP. Dinas menargetkan lelang ulang sistem jalan berbayar itu bisa dimulai pada April mendatang.

Abdul berharap kebijakan sistem jalan berbayar elektronik itu bisa segera diterapkan. Sebab, ERP lebih ampuh untuk mengurangi kemacetan dibandingkan dengan pembatasan kendaraan dengan pelat nomor ganjil-

genap. “Apalagi akan ada pemasukan untuk daerah dengan menerapkan ERP,” tutur politikus PKS itu.

Pada 2019, Dinas Perhubungan menggelar lelang proyek ERP yang diikuti oleh tiga perusahaan, yaitu Q-Free, Kapsch Traffic Com, dan PT Bali Towerindo Sentra Tbk. Q Free dan Kapsch TrafficCom pernah menggelar uji coba ERP pada 2014. Q-Free, perusahaan asal Norwegia, menguji sistem ERP di Jalan HR Rasuna Said. Adapun Kapsch, perusahaan asal Swedia, menguji coba sistem itu di Jalan Jenderal Sudirman.

Belakangan, justru Q-Free dan Kapsch Traffic Com memilih mundur dari proses lelang. Alasannya, mereka menilai jadwal lelang ERP tidak memiliki kepastian. Dengan mundurnya dua perusahaan itu, otomatis tinggal tersisa PT Bali Towerindo Sentra Tbk. ●

ERP lebih ampuh untuk mengurangi kemacetan dibandingkan dengan pembatasan kendaraan dengan pelat nomor ganjil-genap.

Abdul Aziz

Ketua Komisi Bidang Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta

Sengketa Lelang Jalan Berbayar

POLEMIK lelang *electronic road pricing* (ERP) memasuki babak baru.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan yang diajukan oleh PT Bali Towerindo Sentra pada Selasa lalu. Berikut ini sengketa lelang sistem jalan berbayar itu di meja hijau.

2 Agustus 2019

Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik menerbitkan surat pengumuman pembatalan lelang dengan ID 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik.

25 September 2019

PT Bali Towerindo Sentra, salah satu peserta lelang ERP, mendaftarkan gugatan mengenai penerbitan surat pembatalan lelang sistem jalan berbayar elektronik pada PTUN Jakarta.

3 Maret 2020

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan PT Bali Towerindo Sentra. Hakim Pengadilan menganulir surat pembatalan lelang ERP dan memerintahkan Dinas mencabut surat itu.

5 Maret 2020

Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan banding atas putusan PTUN Jakarta tersebut.